

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Sekretariat Daerah

Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.1.1 Pembentukan Dan Penghapusan

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota ditetapkan dengan undang-undang. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang. Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

2.1.2 Pembagian Urusan Pemerintahan

1) Urusan Pemerintahan Pusat

Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah Pusat meliputi enam hal, yaitu :

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional dan
- f. agama.

2) Urusan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan pemerintahan.

2.1.3 Pemerintah Daerah

Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota adalah wali kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

2.1.5 Kepegawaian Daerah

Pemerintah pusat melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional. Manajemen pegawai negeri sipil daerah meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah. Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur

2.1.6 Desa

Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengakui otonomi yang dimiliki oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Desa yang dimaksud dalam ketentuan ini termasuk antara lain Nagari di Sumatera Barat, Gampong di provinsi NAD, Lembang di Sulawesi Selatan, Kampung di Kalimantan Selatan dan Papua, Negeri di Maluku. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Yang dimaksud dengan Perangkat Desa lainnya dalam ketentuan ini adalah perangkat pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, pelaksana teknis lapangan seperti kepala urusan, dan unsur kewilayahan seperti kepala dusun atau dengan sebutan lain. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan sebagai kepala desa. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Masa jabatan kepala desa dalam ketentuan ini dapat dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan Perda.

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundangundangan. Yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa dalam ketentuan ini seperti: Rukun Tetangga, Rukun Warga, PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat.


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

2.1.7 Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah dan atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di Daerah. Koordinasi pembinaan dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi. Pembinaan tersebut meliputi

- a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah

Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan pengangkatan pejabat, penangguhan dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan ketentuan lain yang ditetapkan daerah serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.

2.1.8 Pertimbangan Otonomi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Dewan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Dewan tersebut bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:

- a. Pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah

2.2 Konsep Dasar Sistem Informasi

2.2.1 Definisi Sistem

Menurut Mc.Leod yang dikutip dari mustofa (2015), sistem adalah sebagai kelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai satu tujuan. Sumber daya mengalir dari elemen output dan untuk menjamin prosesnya berjalan dengan baik maka dihubungkan dengan mekanisme control.

2.2.2 Definisi Informasi

Istilah informasi, menurut Davis yang dikutip dari mustofa(2015) adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Sedangkan menurut Mc Leod informasi adalah data yang telah diproses, atau data yang memiliki arti.

2.2.3 Definisi Sistem Informasi

Oetomoyang dikutip dari mustofa(2015)mendefenisikan sistem informasi sebagai kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Robert A mendefenisikan, sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan (Jogiyanto).

Komponen sistem informasi menurut Burch dan Grudnnitski yang dikutip dari mustofa(2015), sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan (*building Block*). Yang terdiri dari (Hanif Al Fatta, 2007):

- 1) Blok masukan (*input block*). Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi. Input disini termasuk metode dan media untuk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.

- 2) Blok model (*model block*). Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.
- 3) Blok keluaran (*output block*). Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem
- 4) Blok teknologi (*technology block*). Teknologi merupakan tool box dalam sistem informasi, digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirim keluaran dan membantu pengendalian dari sistem secara keseluruhan.
- 5) Blok basis data (*database block*). Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras computer dan perangkat lunak digunakan untuk memanipulasinya.
- 6) Blok kendali (*control block*). Pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dicegah dan bila terlanjur terjadi maka kesalahan-kesalahan dapat dengan cepat diatasi.

Sebagai suatu sistem, keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran.

2.3 Sistem Informasi Management Pegawai (SIMPEG)

Sistem Informasi Management Pegawai (SIMPEG) adalah sistem informasi yang mengelola data pegawai di lingkungan secretariat daerah kota pekanbaru,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menampilkan informasi umum mengenai kepegawaian serta berita-berita yang ada di dinas bersangkutan. Adapun fasilitas dari sistem ini adalah :

- a. Menampilkan informasi struktur dinas
- b. Menampilkan informasi kepegawaian
- c. Menampilkan berita-berita dinas
- d. Menyimpan data pegawai
- e. Mencetak daftar riwayat hidup
- f. Mencetak daftar urutan kepangkatan
- g. Memberitahukan jadwal kenaikan pangkat
- h. Memberitahukan jadwal gaji berkala
- i. Memberitahukan jadwal pension pegawai
- j. Membuat surat cuti
- k. Membuat spt dan sppd
- l. Menampilkan rekap absen



Gambar 2.3 Tampilan Sistem Informasi Management Pegawai (SIMPEG)

2.3.1 Spesifikasi Minimal Software

Untuk menjalankan sistem informasi ini dibutuhkan hal berikut :

- a. PHP Server versi 5 keatas

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Basis data My SQL 5 keatas
- c. Filezilla (jika ingin mengupload aplikasi ke hosting)

2.3.2 Spesifikasi minimal hardware

- a. 64-bit x86 CPU
- b. 2GB f Memry
- c. 50GB hardisk
- d. 1 NIC
- e. Static IP adres
- f. Hostname jika ingin online

2.3.3 Peran Pengguna aplikasi

Adapun peran pengguna sistem informasi ini adalah :

- a. Kepala dinas
Mengawasi tugas Admin dalam mengelolah sistem
- b. Admin
Mengelolah sistem, mengella data pegawai dan mengupdate halaman berita maupun informasi
- c. Pegawai
Mengupdate data pribadi

2.3.4 Penggunaan SIMPEG

Pengguna sistem ini terdiri dari 3 jenis, yaitu :

- a. Admin, dapat melihat dan merubah data
- b. Pejabat, dapat melihat semua data dan hanya dapat merubah data pribadinya
- c. Staf, hanya dapat melihat data dan merubah data pribadinya.

Semua fasilitas yang dpat dilakukan admin merupakan keseluruhan fungsi pada sistem ini, berikut ini adalah penggunaan untuk setiap menu yang ada pada sistem ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.5 Login / Logout

Menu ini digunakan jika masuk kedalam sistem sebagai user tertentu. Login dilakukan dengan memasukkan nama dan password sesuai dengan akun yang digunakan, Logout digunakan jika ingin keluar dari hak akses tertentu.

2.3.6 Fungsi Utama SIMPEG

Sesuai dengan Visi Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa", Dan sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional, diperlukan suatu sistem manajemen SDM yang handal serta efektif dan efisien. Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan salah satu SDM yang perlu dikelola dengan baik agar dapat mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan demikian salah satu pendukung pencapaian visi dan misi tersebut adalah tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat sehingga pelaksanaan misi tersebut lebih efektif dan efisien. Untuk mempermudah pengelolaan data dan informasi perlu dibangun suatu sistem aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Daerah atau yang lebih dikenal dengan nama SIMPEG adalah sistem informasi yang terbangun dalam suatu database untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kepegawaian pada Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien. SIMPEG dapat menghasilkan suatu platform data dan informasi yang memungkinkan dihasilkannya output laporan yang berguna untuk kepentingan manajerial, dengan demikian, pengambil keputusan dapat mengolah informasi tersebut menjadi bahan untuk pengambilan keputusan yang valid dan akurat. Ada 2 tujuan dalam SIMPEG yaitu:

- a. Tujuan Jangka Pendek :

SIMPEG dapat menyajikan data yang lebih cepat dan akurat serta dapat diakses oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru secara online. SIMPEG juga dapat mengolah data dan informasi pegawai untuk



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memproses aktivitas kepegawaian yang berbasis web yang menyajikan informasi dinamis tentang kepegawaian yang menyediakan menu untuk mencetak pengisian blanko kepegawaian.

b. Tujuan Jangka Panjang

Terintegrasinya SIMPEG dalam master plan untuk mewujudkan e-government menuju Pekanbaru Smart City.

2.3.7 Manfaat SIMPEG

Dengan dibangunnya SIMPEG online berbasis web dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Tersedianya Data dan Informasi setiap pegawai yang lebih akurat
- b. Setiap Pegawai mempunyai data elektronik yang dapat diakses secara online.
- c. Dapat melakukan proses aktivitas kepegawaian dengan efektif.
- d. Pelayanan tentang informasi kepegawaian yang lebih efektif.
- e. Memudahkan pegawai untuk mencetak data yang diperlukan untuk administrasi kepegawaian.

2.4 Website

Website sebagai komponen dari suatu identitas, yang dipengaruhi oleh pendapat public dan terbentuk dari perilaku dan karakter sebuah perusahaan, individu atau Negara. Bahkan Toms dan Taves mengemukakan bahwa situs web yang menjadi perhatian utama dikalangan pengguna internet adalah web perjalanan (travel web). Bahkan dua dari tiga pengguna internet menggunakan internet untuk melakukan perencanaan perjalanan dan akhirnya lebih dari sepertiga mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian setelahnya mengungkapkan bahwa dua dari tiga browser internet menggunakan internet untuk perencanaan perjalanan, dan sedikit lebih dari sepertiga dari mereka melakukan pembelian setelah itu. (Yuhefizar, dikutip oleh / andi, 2013)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.1 Fungsi Website

Secara umum web mempunyai empat fungsi sebagai berikut (Hermawan, dikutip oleh Andi, 2013):

a. Fungsi Komunikasi

Situs web yang mempunyai fungsi komunikasi pada umumnya adalah situs web dinamis. Karena dibuat menggunakan pemrograman web maka dilengkapi fasilitas yang memberikan fungsi-fungsi komunikasi, seperti web mail, form contact, chatting, forum dan yang lainnya.

b. Fungsi informasi

Situs web yang mempunyai fungsi informasi pada umumnya lebih menekankan pada kualitas bagian kontennya karena tujuan situs web tersebut adalah menyampaikan isinya. Situs ini sebaiknya berisi dan grafik yang dapat di download dengan cepat. Pembatasan penggunaan animasi gambar dan elemen-elemen bergerak seperti shockwave dan java diyakini sebagai langkah yang tepat, diganti dengan fasilitas yang memberikan fungsi informasi seperti news, profile, company, library, reference dan lain-lain.

c. Fungsi entertainment

Situs web juga dapat memiliki fungsi entertainment. Bila situs web berfungsi sebagai sarana hiburan maka penggunaan animasi gambar dan elemen bergerak dapat meningkatkan mutu presentasi desainnya, meski tetap harus mempertimbangkan kecepatan downloadnya. Beberapa fasilitas yang memberikan fungsi hiburan adalah game online, film onlinedan sebagainya.

d. Fungsi Transaksi

Situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis, baik barang, jasa, atau lainnya. Situs web ini menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik. Pembayaran bisa menggunakan kartu kredit, transfer, ataupun dengan membayar langsung.

2.4.2 Jenis situs Web

Website berdasarkan jenisnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Alat pemasaran

Sebuah web yang dibuat dengan tujuan untuk mempromosikan dan memasarkan produk atau jasa

2) Nilai tambah

Biasanya sebuah halaman pada awalnya disusun sebagai sarana promosi, karena media promosi di web lebih murah dan efektif dibandingkan media promosi konvensional seperti brosur, majalah dan Koran.

3) Portal

Portal adalah aplikasi berbasis web yang menyediakan akses suatu titik tunggal dari informasi online terdistribusi, seperti dokumen yang didapat melalui pencarian, kanal berita, dan link kesitus khusus.

4) Personal

Situs personal merupakan situs yang memiliki tujuan untuk mempromosikan atau menginformasikan tentang seseorang, biasanya berisi tentang biodata, portofolio (kumpulan hasil karya yang pernah dibuat), prestasi, atau sebagai diary yang menceritakan kehidupan sehari-hari yang dipublish agar orang lain dapat mengetahui dan mengenal tentangnya.

2.4.3 Kriteria Web Yang Baik

Dilingkungan internet, kualitas sistem dinilai oleh pengguna diantaranya adalah sebagai berikut Menurut (Hermawan, dikutip oleh Andi, 2013) yang diambil dari tugas akhir ger mustofa :

a. Ketergunaan (*Usability*)

Situs web harus memenuhi lima syarat untuk mencapai tingkat *Usability* yang ideal, antara lain: mudah dipelajari, efisien dalam penggunaan, mudah untuk diingat, tingkat kesalahan rendah. Atribut kualitas yang menjelaskan atau mengukur seberapa mudah penggunaan suatu antar muka (*interface*). Kata *Usability* juga merujuk pada suatu metode untuk meningkatkan kemudahan pemakaian selama proses desain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sistem navigasi (*Structur*)

Kemudahan bernavigasi dalam situs web melibatkan sistem navigasi situs web secara keseluruhan dan desain interface situs web tersebut. Navigasi membantu pengunjung untuk menemukan jalan yang mudah ketika menjelajah situs web, memberitahu dimana mereka berada, kemana mereka bisa pergi. Dengan demikian mereka dapat menemukan apa yang mereka cari dengan cepat dan mudah.

c. Desain visual

Kepuasan visual seorang user secara subjektif melibatkan bagaimana designer visual situs web tersebut membawa mata user menikmati dan menjelajah situs web dengan menjelajahi situs web dengan melalui layout, warna, bentuk dan tipografi. Grafik membuat halaman web menjadi indah tetapi bisa juga memperlambat akses dengan semakin besarnya ukuran file.

d. Lama respon

Jumlah lama waktu yang dihitung dari akhir permintaan tersebut dilayani, ini berkaitan dengan kecepatan sistem website itu sendiri.

e. Contents

Sebaik apapun situs web secara design grafis, tanpa konten yang berguna dan bermanfaat maka akan kurang berarti. Konten yang baik akan menarik, relevan, dan pantas untuk target audien situs web tersebut.

f. Accesbility

Halaman web harus bisa digunakan oleh setiap orang, baik anak-anak, orang tua, orang muda, dan termasuk orang cacat.

g. Interactivity

Buat situs web yang memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan situs web.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.4 Kualitas Informasi Web

Kualitas informasi mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi. (Lareker dkk, 1980 dikutip oleh Andi, 2013) yang dikutip dari tugas akhir ger mustofa mengembangkan enam item pertanyaan untuk mengukur kepentingan persepsi dan kebergunaan informasi dari informasi yang disajikan dan laporan-laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Seperti pengukuran isi web harus personal, lengkap relevan, mudah dipahami dan aman. Indikator yang diukur meliputi:

- a. Kelengkapan (*Completeness*)
- b. Ketepatan (*Precision*)
- c. Akurasi (*Accuracy*)
- d. Keandalan (*reliabeility*)
- e. Kekinian (*Currency*)
- f. Bentuk kelularan (*Format of output*)

Pengukuran-pengukuran kualitas informasi diatas merupakan hasil penelitian *Delone* dan *McLean* dan sudah terbukti keakuratannya dalam melakukan pengukuran terhadap sistem informasi yang dibangun.

2.4.5 Pengukuran Terhadap Kualita Web

Webqual merupakan salah satu metode atau teknik pengukuran kualitas website berdasarkan persepsi pengguna akhir. Metode ini merupakan pengembangan dari SERVQUAL yang banyak digunakan sebelumnya pada pengukuran kualitas jasa. WebQual sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1998 dan telah mengalami beberapa interaksi dalam penyusunan dimensi dan butir pertanyaannya (Sanjaya, 2012 dikutip oleh Andi, 2013). WebQual disusun berdasarkan penelitian pada tiga area (*dimensi*) kualitas yaitu sebagai berikut:

- a. Dimensi Kemudahan Penggunaan (*Usability*)

Usability adalah atribut kualitas yang menjelaskan atau mengukur seberapa mudah penggunaan suatu antar muka (*interface*). Kata *usability* juga menunjuk pada suatu penggunaan suatu metode untuk meningkatkan kemudahan pemakaian selama proses desain.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dimensi Kualitas Informasi (*Information Quality*)

Kualitas informasi tergantung dari tiga hal yaitu: informasi harus akurat, tepat waktu, dan relevan.

c. Dimensi Kualitas Interaksi (*Interaction Quality*)

Kualitas interaksi adalah sejauh mana sistem dapat berinteraksi kepada pengguna, baik organisasi atau pengguna lainnya, agar hubungan terhadap sistem dapat berjalan dengan terus menerus.

2.5 TAM (*Technology Acceptance Model*)

Salah satu teori tentang penggunaan system teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individual terhadap pengguna system informasi adalah model penerimaan teknologi *Technology Acceptance Model*(TAM).Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Davis (1986).Teori ini dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action* atau *TRA* oleh Ajzen dan Fishbein.

2.5.1 Konsep Penerimaan Teknologi

Model penerimaan teknologi (*Technology Acceptance Model* atau TAM) merupakan suatu model system penerimaan teknologi informasi yang digunakan oleh pemakai. Model penerimaan teknologi atau *Technology Acceptance Model* (TAM) dikembangkan oleh Davis et al.(1989) berdasarkan model TRA.

Model TRA dapat diterapkan karena keputusan yang dilakukan individu untuk menerima suatu teknologi system informasi merupakan tindakan sadar yang dapat dijelaskan dan di prediksi oleh niat pelakunya. TAM menambahkan dua konstruk utama kedalam model TRA. Dua konstruk ini adalah kegunaan persepsian (*perceived usefulness*) dan kemudahan pengguna persepsian (*perceived ease of use*).TAM berargumentasi bahwa penerimaan individual terhadap system teknologi informasi ditentukan oleh dua konstruk tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

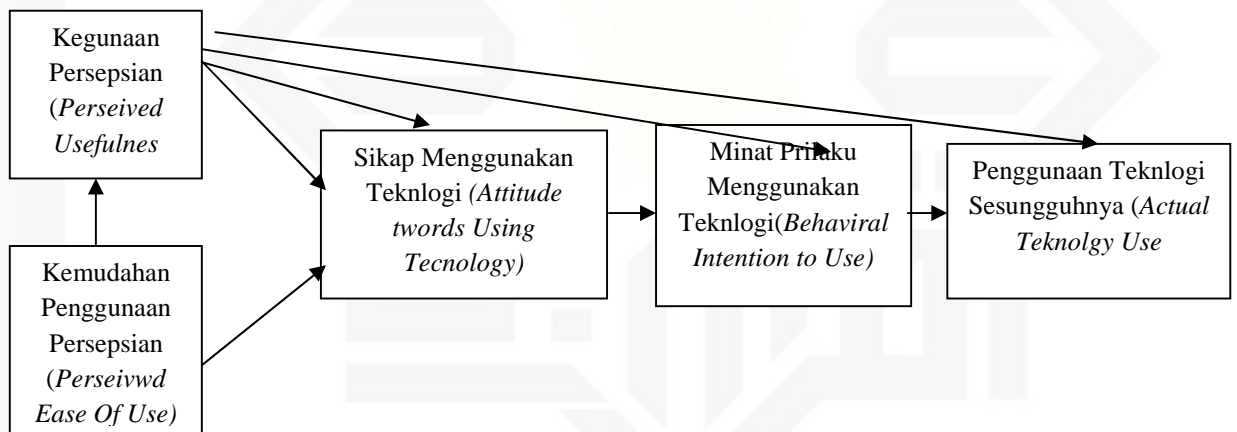
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegunaan persepsian (*perceived usefulness*) dan kemudahan pengguna persepsian (*perceived ease of use*).Keduanya memiliki pengaruh keiat pelaku (*behavioral intention*). Pemakai teknologi akan memiliki niat menggunakan teknologi (niat perilaku)jika merasa system teknologi bermanfaat dan mudah digunakan.

Kemudahan Kegunaan persepsian (*perceived usefulness*) mempengaruhi pengguna persepsian (*perceived ease of use*). Pemakai system akan menggunakan system jika pertama merasa bahwa system tersebut mudah digunakan.

Karena TAM dimaksudkan untuk penggunaan teknologi, maka perilaku(*behavior*) di TAM dimaksudkan sebagai perilaku menggunakan teknologi. Oleh karena itu TAM juga banyak dituliskan lebis spesifikpada penggunaan teknologi sebagai berikut :



Sumber : Jogianto (2005)

Gambar 2.4.1. *Tecnology Acceptance Model (TAM) yang Spesifik Menyebutkan Perilaku Sebagai Pengguna Teknologi*

2.5.2 Konstruk – Konstruk di Dalam TAM

TAM (*technology acceptance model*) yang pertama yang belum di modifikasi menggunakan 5 konstruk utama. Ke 5 konstruk ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan persepsian (*perceived usefulness*)
- b. Kemudahan pengguna persepsian (*perceived ease of use*)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sikap terhadap perilaku (*attitude toward behavior*) atau sikap menggunakan teknologi (*attitude toward using technology*)
- d. Niat perilaku (*behavioral intention*) atau niat perilaku menggunakan teknologi (*behavioral intention to use*)
- e. Perilaku (*behavior*) atau pengguna teknologi sesungguhnya (*actual technology*)

2.5.2.1 Kegunaan persepsian (*perceived usefulness*)

Persepsi manfaat (*perceived usefulness*) didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan meningkatkan kinerja pekerjaannya (*"as the extent to which a person believes that using a technology will enhance her or his performance."*).

Dari definisinya, diketahui bahwa persepsi manfaat (*perceived use fulness*) merupakan suatu kepercayaan (*belief*) tentang proses pengambilan keputusan. Dengan demikian jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi berguna maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi kurang berguna maka dia tidak akan menggunakannya (Jogiyanto, 2007).

Pengukuran konstruk manfaat (*usefulness*) menurut Davis (1986) terdiri dari:

- a. Menjadikan pekerjaan lebih cepat (*work more quickly*)
- b. Bermanfaat (*useful*)
- c. Menambah produktifitas (*Increase productivity*)
- d. Mempertinggi efektifitas (*enchance efectiveness*)
- e. Mengembangkan kinerja pekerjaan (*improve job performance*)

2.5.2.2 Kemudahan pengguna persepsian(*perceived ease of use*)

Kemudahan penggunaan (*ease of use*) didefinisikan sebagai sejauhmana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*“is the extent to which a person believes that using a technology will be free of effort.”*).

Dari definisinya, diketahui bahwa konstruk kemudahan penggunaan persepsian (*perceived ease of use*) ini juga merupakan suatu kepercayaan (*belief*) tentang proses pengambilan keputusan. Jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan menggunakannya. Sebaliknya jika seseorang merasa percaya bahwa sistem informasi tidak mudah digunakan maka dia tidak akan menggunakannya (Jogiyanto, 2007).

Davis.F.D memberikan beberapa indikator konstruk kemudahan penggunaan yaitu:

- a. Kemudahan untuk dipelajari (*easy to learn*)
- b. *Controllable*
- c. *Clear & understable*
- d. *Flexible*
- e. Keterampilan menjadi bertambah (*easy to become skillful*)
- f. Mudah digunakan (*easy to use*)

2.5.2.3 Sikap terhadap perilaku

Sikap Terhadap Perilaku didefinisikan sebagai suatu sikap menerima ataupun menolak penggunaan sistem informasi berbasis teknologi oleh pengguna sistem informasi tersebut (Mustofa, 2015). Sikap Terhadap Perilaku terdiri dari dimensi keuntungan yang diterima oleh pengguna sistem informasi, perasaan menolak pengguna sistem informasi, serta perasaan yang dirasakan oleh pengguna ketika menggunakan sistem informasi berbasis teknologi.

2.5.2.4 Niat perilaku

Niat Perilaku didefinisikan sebagai kecenderungan perilaku pengguna untuk tetap menggunakan suatu sistem informasi berbasis teknologi (Wibowo, 2010). Niat Perilaku terdiri dari beberapa dimensi diantaranya yaitu keinginan pengguna untuk menambah jenis sistem informasi berbasis

teknologi yang digunakan, motivasi pengguna untuk terus menggunakannya di masa mendatang, serta keinginan pengguna untuk memotivasi pengguna lain untuk ikut memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi tersebut.

2.6 Populasi Dan Sampel

Populasi didefinisikan sebagai suatu keseluruhan pengamatan atau objek yang menjadi perhatian kita. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi perhatian kita. Populasi menggambarkan sesuatu yang sifatnya ideal atau teoretis, sedangkan sampel menggambarkan sesuatu yang sifatnya nyata atau empiris. Populasi dan sampel masing-masing mempunyai karakteristik atau ciri yang dapat diukur.

Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil menjadi persoalan yang penting manakala jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. Pada penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif, ukuran sampel bukan menjadi nomor satu, karena yang dipentingkan adalah kekayaan informasi. Walau jumlahnya sedikit tapi kaya akan informasi, maka sampelnya lebih bermanfaat (Umar, 2008).

Secara garis besar teknik penarikan sampel dapat dibagi menjadi dua, yaitu *probability Sampling* dan *Nonprobability Sampling*:

2.6.1 Probability Sampling

Probability Sampling adalah metode sampling yang setiap anggota populasinya memiliki peluang spesifik dan bukan nol untuk terpilih sebagai sampel. Peluang tersebut dapat sama, dan dapat pula tidak sama besarnya dengan anggota populasi lainnya. Jenis-jenis *Probability Sampling* antara lain:

a. Sampling Acak Sederhana

Metode pengambilan sampel acak sederhana adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel. Ini berarti bahwa semua anggota populasi menjadi anggota dari kerangka sampel.

b. Sampling Acak Sistematis

Metode pengambilan acak sistematis adalah metode untuk mengambil sampel secara sistematis dengan interval (jarak) tertentu dari suatu kerangka sampel yang telah diurutkan. Dengan demikian, tersedianya suatu populasi sasaran yang tersusun merupakan prasyarat penting bagi dimungkinkannya pelaksanaan pengambilan sampel dengan metode acak sistematis.

c. Sampling Acak Stratifikasi

Metode pengambilan acak stratifikasi adalah metode pengambilan sampel dengan cara membagi populasi kedalam kelompok-kelompok yang homogeny yang disebut strata, dan kemudian sampel diambil secara acak dari tiap strata tersebut.

d. Sampling Klaster (Cluster Sampling)

Metode pengambilan sampel klaster adalah metode yang digunakan untuk memilih sampel yang berupa kelompok dari beberapa kelompok, dimana setiap kelompok terdiri atas beberapa unit yang lebih kecil (*elements*). Jumlah elemen dari masing-masing kelompok bisa sama maupun berbeda.

2.6.2 *Nonprobability Sampling*

Dalam *Nonprobability Sampling*, setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Di dalam penarikan sampel probabilita, kesempatan yang mempunyai peranan besar. Sedangkan dalam penarikan sampel non probabilita, kesempatan yang mempunyai peranan besar. Sedangkan dalam penarikan sampel non probabilita yang berperan adalah kemampuan atau pengetahuan peneliti terhadap populasi penelitiannya. Semakin baik kemampuan dan pengetahuan peneliti tentang populasinya, semakin baik pula tingkat keterwakilan populasinya. Beberapa jenis teknik sampling dari *Nonprobability Sampling* ini antara lain:

a. Accidental Sampling (kebetulan)

Pada pengambilan sampel dengan cara ini, sampel diambil berdasarkan ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Dengan kata lain sampel dipilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. *Judgment Sampling*

Dengan teknik ini sampel diambil berdasarkan kriteria-kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah *public*. Kriteria lain misalnya adalah perusahaan-perusahaan yang membangun sendiri sistem teknologi informasinya, bukan mereka yang membeli atau melakukan *outsourcing*.

c. *Quota Sampling*

Quota Sampling adalah *purposive sampling* yang mengambil persentasi yang mengambil persentasi sampelnya sesuai dengan persentase jumlah dipopulasinya. *Quota Sampling* beralih bahwa sampel harus mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh populasinya. Misalnya apabila subyek kurang dari 100, maka lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar, maka dapat diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.

d. *Snowball Sampling*.

Cara mengambil sampel dengan teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan sampel dari responden yang berasal dari referensi suatu jaringan, misalnya lewat *Newgroup* di internet.

e. Sampel Jenuh

Sampel jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, yaitu semua populasi dijadikan sampel.

2.7 Uji Kualitas Data

Ketetapan penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai. Kualitas data penelitian suatu hipotesis sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai didalam penelitian tersebut. Kualitas data penelitian di tentukan oleh instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data (Mustofa,2015) untuk menghasilkan data yang berkualitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7.1 Uji Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalid atau kesahihan. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variable yang diteliti secara tepat (Azwar,2000). Validitas ditentukan sengan cara menghitung korelasi r masing-masing pertanyaan (X) dengan skor total (Y).

Teknik yang digunakan untuk mengetahui suatu item test dikatan valid yaitu dengan menggunakan rumus korelasi *product moment* sebagai berikut (Arikunto,2002)

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum x^2\} \{n\sum y^2 - (\sum y)^2\}}} \quad (2.1)$$

Keterangan :

r = Koefisien validitas item yang dicari

n = Jumlah responden

x = Skor yang diperoleh subyek dalam setiap item

y = Skor yang diperoleh subyek dalam setiap item

$\sum x$ = Jumlah skor dalam variabel x

$\sum y$ = jumlah skor dalam variabel y

Kriteria dalam pengujian hipotesis validitas dalam penelitian adalah :

- 1) Kuesioner dikatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel
- 2) Kuesioner dinyatakan tidak valid apabila r hitung $<$ r table

2.7.2 Uji Reabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah butir-butir pernyataan dalam angket betul-betul *reable* dan konsisten untuk mengukur gejala yang sama pada responden. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode *Cronbach Alpha*. Suatu pernyataan dinyatakan reliabel apabila nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,60. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan metode *Cronbach Alpha* terhadap responden. Dengan rumus , yaitu:

$$r_{11} = \frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum \sigma^2_b}{\sigma^2_t} \right] \quad (2.2)$$

Keterangan :

r_{11} = Reabilitas Instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma^2_b$ = Jumlah Varian butir

σ^2_t = Varian Total

Semakin besar nilai *cronbach* yang didapat, maka semakin tinggi tingkat reliabilitas penelitian yang dilakukan

2.8 Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan analisis data kuantitatif diperlukan uji persyaratan analisis. Persyaratan uji analisis untuk Regresi Berganda disebut dengan istilah Uji Asumsi Klasik. Menurut Damodar Gujarati (2006) agar model regresi tidak bias atau agar model regresi BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *Ordinary Least Square* (OLS). Jadi, analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain.

2.8.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu (residual) memiliki distribusi normal, seperti diketahui, uji t dan uji F mangasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Deteksi normalitas dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas. (Ghozali, 2007).

2.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas satu dengan variabel bebas yang lainnya. Dalam analisis regresi berganda, maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas yang di duga akan mempengaruhi variabel tergantungnya. (Sudarmanto, 2005). Jika variable bebas terdapat korelasi yang cukup tinggi dari R^2 maka terjadi multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variable bebas tersebut. (Ghozali, 2007).

Multikolinieritas dapat diuji melalui nilai toleransi dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai VIF dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{1-R^2} = \frac{1}{Toleransi} = \text{nilai tolerans} > 0.1$$

- a. Jika $VIF > 10$, terdapat persoalan multikolinieritas diantara variable bebas.
- b. Jika $VIF < 10$, tidak terdapat persoalan multikolinieritas diantara variabel bebas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka terjadi *heteroskedastisitas*. Untuk mendeteksi ada tidaknya *heteroskedastisitas* adalah dengan cara melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dan residualnya SRESID. Jika gambar membentuk pola tertentu maka ada masalah *heteroskedastisitas* dan jika tidak membentuk berarti tidak ada masalah *heteroskedastisitas*. (Ghozali, 2007).

2.8.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya.

Sebagai contoh adalah pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar. Data tingkat inflasi pada bulan tertentu, katakanlah bulan Februari, akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan Januari. Berarti terdapat gangguan autokorelasi pada model tersebut. Contoh lain, pengeluaran rutin dalam suatu rumah tangga. Ketika pada bulan Januari suatu keluarga mengeluarkan belanja bulanan yang relatif tinggi, maka tanpa ada pengaruh dari apapun, pengeluaran pada bulan Februari akan rendah.

Autokorelasi dapat diuji dengan *Durbin Watson* dengan rumus sebagai berikut :

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{t=n} (e_1 - e_{t-1})^2}{\sum_{t=2}^{t=n} e_1^2} \tag{2.3}$$

Untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dapat digunakan ketentuan sebagai berikut (Firdaus, 2011) :

- a) Angka D-W di bawah -2 berarti ada korelasi positif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Angka D-W di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- c) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

2.9 Analisis Regresi Linear Berganda

Pengertian regresi secara umum adalah sebuah alat statistik yang memberikan penjelasan tentang pola hubungan (model) antara dua variabel atau lebih. Dalam analisis regresi dikenal dua jenis variabel yaitu:

- 1) Variabel Respon disebut juga variabel dependen yaitu variabel yang keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lainnya dan dinotasikan dengan Y.
- 2) Variabel Prediktor disebut juga dengan variabel independen yaitu variabel yang bebas (tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya) dan dinotasikan dengan X.

Untuk mempelajari hubungan-hubungan antara variabel bebas maka regresi linier terdiri dari dua bentuk, yaitu analisis regresi sederhana (*simple analysis regresi*) dan analisis regresi berganda (*multiple analysis regresi*). Analisis regresi berganda merupakan hubungan antara tiga variabel atau lebih, yaitu sekurang-kurangnya dua variabel bebas dengan satu variabel tak bebas. Regresi linier berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara peubah respon (variabel dependen) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi lebih dari satu prediktor (variabel independen). Regresi linier berganda hampir sama dengan regresi linier sederhana, hanya saja pada regresi linier berganda variabel bebasnya lebih dari satu variabel penduga. Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mengukur intensitas hubungan antara dua variabel atau lebih dan membuat prediksi perkiraan nilai atas X dan Y.

Bentuk umum model regresi linier berganda dengan variabel bebas adalah seperti pada persamaan berikut (Kutner, Nachtsheim dan Neter, 2004) :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots \dots \dots b_kX_k +$$

(2.4)Keterangan :

X, X₁, X₂,.....X_k= Variabel-variabel

a, b₁, b₂,.....b_k= Bilangan konstan (konstanta) koefisien variabel

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Gujarati (2003) asumsi-asumsi pada model regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

1. Model regresinya adalah linier dalam parameter.
2. Nilai rata-rata dari error adalah nol.
3. Variansi dari error adalah konstan (homoskedastik).
4. Tidak terjadi autokorelasi pada error.
5. Tidak terjadi multikolinieritas pada variabel bebas.
6. Error berdistribusi normal.

2.10 Uji Hipotesis

2.10.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji Secara Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. Adapun pengujiannya dengan cara membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel pada tingkat signifikan 0,05. Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini adalah jika t-hitung > t-tabel maka variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat, artinya secara parsial ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.

2.10.2 Uji Simultan (Uji f)

Uji Secara Simultan (Uji f) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen (X_1, X_2) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). Uji f dilakukan dengan membandingkan antara f-hitung dan f-tabel pada tingkat signifikan 0,05. Apabila f-hitung > f-tabel maka variabel-variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap persepsi manajemen sebagai variabel terikat.

2.10.3 Koefisien Determinasi

Untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat, digunakan koefisien determinasi (R^2). Koefisien ini menunjukkan proporsi variabilitas total pada variabel terikat yang dijelaskan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

model regresi. Nilai R^2 berada pada interval $0 < R^2 < 1$. Secara logika dapat diketahui bahwa makin baik estimasi model dalam menggambarkan data, maka makin dekat nilai R ke nilai 1 (satu). Nilai R^2 dapat diperoleh dengan rumus :

$$R^2 = (r)^2 \times 100\% \quad (2.5)$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien determinasi atau seberapa jauh perubahan variabel terkait
(penggunaan *Open Source*)

r = Korelasi berganda

